

JURNAL

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ADAT (LETTER C)
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Diajukan oleh :

GIOVANI AGNELLI SUSANTI

**NPM : 090510048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ADAT (LETTER C)
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Diajukan oleh :

GIOVANI AGNELLI SUSANTI

**NPM : 090510048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Dosen Pembimbing I

S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ADAT (LETTER C)
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN
TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Giovani Agnelli Susanti, S.W. Endah Cahyowati, Maria Hutapea

**Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

This legal writing is entitled The Conversion of Customary Property Rights (Letter C) through PRONA in fulfilling Land Administration Order in Gunungkidul. The problem formulation is how does the implementation of conversion of customary property rights through PRONA on 2012 in Gunungkidul and is it orderly administration of land.

The resources such as primary data and secondary data. The primary data was collected from respondents and the speakers. The secondary data consist of primary legal materials derived from legislation and secondary legal materials of a literature study related to the conversion of customary property rights (Letter C) through PRONA to realize land administration order. The analysis method used is qualitative analysis stated orally by the respondents and also studied, analyzed as so solid method. In drawing conclusion, the inductive way of thinking is needed because facts that are specified are drawn from generic conclusions.

The customary property rights (Letter C) converted into the property through the PRONA on 2012 in Gunungkidul there are some ways done based on the Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Presidential Decree Number 189 of 1981 on Proyek Operasi Nasional Agraria but there are 13 respondents who earn income above the minimum eligibility standards, 9 respondents acquire land through the grant without the grant deed, and each respondent charged an administration fee. The constraints of conversion are the existence of another distant heir, the Letter C have been damaged and geographical location. It is suggested for the local government not to collect money from villagers and the land offices conduct training about the land registration in order to let the citizen understand about the importance to register their land.

Keywords: Conversion of Customary Property Rights, Letter C, Land Registration, Land Administration Order.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah berperan penting bagi kesejahteraan rakyat salah satunya adalah sebagai tempat tinggal sehingga antara tanah dan manusia terdapat hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai fungsi bumi, air dan ruang angkasa maka dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah Indonesia bersifat dualistis yaitu selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang bersumber pada Hukum Adat, diakui pula peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan pada Hukum Barat.¹ Berlakunya peraturan-peraturan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai masalah antargolongan yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum.

Setelah berlakunya UUPA, kedua macam hak atas tanah yang berlaku sebelum UUPA tersebut dikonversi berdasarkan ketentuan UUPA. Konversi hak atas tanah menurut A.P Perlindungan adalah perubahan hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.²

Berdasarkan Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, hak-hak atas tanah yang mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA yaitu hak agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dikonversi salah satunya menjadi hak milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hak milik adalah hak

¹ Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

² A.P. Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6.

Pasal 19 UUPA menentukan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 23 ayat (1) UUPA menentukan bahwa setiap peralihan, hapus dan pembebanan hak milik wajib didaftarkan. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pemegang hak atas tanah yang sudah

mendaftarkan hak atas tanahnya akan menerima sertipikat hak atas tanah. Bagi yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah maka orang tersebut memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Pasal 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terbitnya sertipikat tersebut merupakan dasar dan perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan. Tertib administrasi pertanahan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III). Tertib administrasi berarti data-data setiap bidang tanah dicatat dapat diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.

Pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.” Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Nasional Operasi Nasional Agraria. Sasaran dari kegiatan PRONA

adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan maksud masyarakat yang karena keadaan perekonomiannya tidak mungkin untuk bisa membiayai semua pungutan biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat sehingga oleh karenanya perlu mendapat perhatian dari pemerintah.³ Kegiatan PRONA di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sejak tahun 2006 namun sampai tahun 2011 baru mencapai 40,78% bidang tanah yang didaftar.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama oleh masyarakat Indonesia salah satunya dibuktikan dengan Letter C seperti yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul dan apakah telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

PEMBAHASAN

a. Pelaksana kegiatan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) sesuai Pasal 3 huruf (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional membentuk Tim Pengarah Kegiatan PRONA untuk melaksanakan

³ Adiran Sutedi, *Op. Cit.*, hlm.71.

pembinaan dan pengawasan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DIY dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Kanwil BPN Provinsi DIY sesuai Pasal 3 huruf (b) dan (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menentukan bahwa Kanwil BPN melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul sesuai Pasal 53 huruf (e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah melalui kegiatan PRONA mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan sertipikat.

b. Penetapan lokasi

Pelaksanaan kegiatan PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan perencanaan lokasi dan jumlah bidang oleh Kakanwil BPN Provinsi DIY dengan memperhatikan usulan data nominasi peserta dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yaitu Desa Pampang dan Desa Karangduwet (Kecamatan Paliyan) dan Desa Krambilsawit dan Desa Kepek (Kecamatan Saptosari) sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 *juncto* Diktum Kedua KMDN Nomor 189 Tahun 1981 yaitu penentuan lokasi berdasarkan masyarakat golongan ekonomi lemah.

c. Penyuluhan

Sesuai Pasal 56 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 yaitu disampaikan langsung secara lisan oleh Kakanwil BPN Provinsi DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Desa (Desa Pampang, Karangduwet, Krambilsawit dan Kepek). Kegiatan penyuluhan bertempat di masing-masing balai desa. Dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan PRONA dibentuk panitia sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tim Koordinasi PRONA terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata;
- 2) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- 3) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

Panitia lapangan terdiri dari :

- 1) Seorang petugas yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul untuk setiap desa;
- 2) Seorang petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul untuk setiap desa;
- 3) Kepala Desa yang dibantu oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Permusyawaratan Desa, Dukuh, Ketua RT dan RW (Desa Pampang, Karangduwet, Krambilsawit dan Kepek).

d. Pengumpulan data

Pengumpulan data (persyaratan) dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan cara responden memperoleh bidang tanah yaitu sebagai berikut:

1) Pemilik pertama (konversi murni)

Dua puluh satu responden yang terdiri dari dua responden berusia 40-50 tahun, 14 responden berusia 51-60 tahun dan lima responden berusia 61-70 tahun adalah pemilik pertama bidang tanah. Luas tanah responden berkisar antara 100 sampai dengan 1500 m². Persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden pemilik tanah pertama untuk mengajukan permohonan konversi melalui PRONA tahun 2012 sebagai berikut adalah salinan Letter C atas nama responden, fotokopi Kartu Keluarga responden, fotokopi KTP responden dan SPPT PBB tahun 2011. Dalam hal pemenuhan persyaratan, 21 responden pemilik tanah pertama tidak mengalami kesulitan.

2) Pewarisan

Delapan belas responden yang terdiri 11 responden berusia 30-40 tahun, lima responden berusia 41-50 tahun dan dua responden berusia 51-60 tahun memperoleh tanah melalui pewarisan. Luas tanah yang dimiliki berkisar 100 sampai dengan 1800 m². Persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden yang memperoleh tanah melalui pewarisan untuk mengajukan konversi melalui PRONA tahun 2012 adalah salinan Letter C atas nama pewaris, fotokopi Surat Kematian

pewaris, fotokopi Kartu Keluarga pewaris, fotokopi KTP istri/suami pewaris yang masih hidup, surat Keterangan Ahli Waris, surat Keterangan Tidak Menerima Warisan, fotokopi KTP para ahli waris, fotokopi akta kelahiran responden dan SPPT PBB tahun 2011. Dalam hal pemenuhan persyaratan, 2 responden yang berasal dari Desa Kepek mengalami kesulitan memperoleh identitas ahli waris yang lain karena sudah tidak bertempat tinggal di Provinsi DIY dan Pulau Jawa. Hal ini ditanggapi oleh panitia Desa Kepek untuk bertemu langsung dengan ahli waris yang bersangkutan dan untuk memastikan bahwa pewarisan tidak mengalami masalah sehingga proses konversi dapat berjalan lancar.

3) Hibah

Sembilan responden yang terdiri dari empat responden berusia 20-30 tahun, dua responden berusia 31-40 tahun dan tiga responden berusia 41-50 responden memperoleh tanah melalui hibah. Luas tanah yang dimiliki berkisar antara 100 sampai dengan 1600 m². Persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden yang memperoleh tanah melalui hibah untuk mengajukan konversi melalui PRONA tahun 2012 adalah salinan Letter C atas nama penghibah, akta hibah, fotokopi Kartu Keluarga pemberi hibah, fotokopi KTP pemberi hibah, fotokopi Kartu Keluarga reponden, fotokopi KTP responden dan SPPT PBB tahun 2011. Sembilan responden tidak mengetahui bahwa tanah yang dimiliki adalah melalui hibah, mereka memahami bahwa tanah diperoleh dari

orang tua yang masih hidup adalah pewarisan sehingga perolehan hibah tidak dilengkapi dengan akta hibah. Maka diberikan solusi dalam hal persyaratan menggunakan persyaratan seperti yang ditentukan kepada responden sebagai pemilik tanah pertama.

4) Jual beli

Dua responden berusia 43 tahun dan 55 tahun memperoleh tanah melalui jual beli. Luas tanah yang dimiliki adalah 75 m² dan 144 m². Persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden yang memperoleh tanah melalui jual beli untuk mengajukan permohonan konversi melalui PRONA tahun 2012 adalah salinan Letter C atas nama penjual, akta jual beli, fotokopi Kartu Keluarga penjual, fotokopi KTP suami/istri penjual, fotokopi Kartu Keluarga responden, fotokopi KTP responden dan suami/istri responden, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Responden yang terpilih sebagai peserta PRONA adalah responden yang mendaftarkan diri terlebih dahulu sampai batas jumlah yang telah ditetapkan oleh Kakanwil BPN Provinsi DIY. Responden yang telah mempersiapkan persyaratan mendaftarkan diri ke ketua RT. Ketua RT akan menyerahkan persyaratan kepada dukuh kemudian oleh dukuh diserahkan kepada panitia lapangan di Kantor Desa. Kemudian panitia lapangan dari masing-masing desa membantu mengisi berkas permohonan konversi dan petugas yuridis membimbing dan memeriksa kelengkapan persyaratan responden serta berkas permohonan konversi kepada petugas

administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul untuk diteliti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Setiap responden dari masing-masing desa dikenakan biaya administrasi oleh masing-masing kantor desa sebesar Rp 297.500,00 (Desa Pampang), Rp 450.000,00 (Desa Karangduwet), Rp 400.000,00 (Desa Krambilsawit) dan Rp 350.000,00 (Desa Kepek) yang dapat dibayarkan pada awal pendaftaran atau pada saat pengambilan sertifikat. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan materai, alat tulis, sampul sertifikat, patok, akomodasi panitia dan honor panitia. Pembayaran dapat dilakukan dua kali. Hal ini tidak sesuai dengan Diktum Kedua huruf (a) dan Diktum Ketujuh KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria sebab kegiatan PRONA ditujukan kepada lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah dan semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Yayasan Dana Landreform.

e. Pengukuran dan pemetaan

Pengukuran dilakukan oleh seorang petugas ukur yang dibantu oleh panitia dari masing-masing desa. Pengukuran dilakukan dengan memasang tanda batas sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf (e) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu berupa tugu beton (patok) dengan tinggi 0,5 meter. Pengukuran dan pemasangan patok dihadiri oleh responden dan empat orang saksi

(tetangga). Pemetaan dilakukan di hari yang sama setelah pengukuran masing-masing bidang tanah selesai dengan pembuatan sket data lapangan dalam satu gambar ukur sesuai dengan Pasal 18 angka (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

f. Pengumuman

Pengumuman data fisik dan data yuridis dilaksanakan selama 60 hari di Kantor Desa Pampang, Karangduwet, Krambilsawit dan Kepek telah dengan sesuai Pasal 86 angka (2) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

g. Pengesahan data fisik dan data yuridis

Sesuai dengan Pasal 87 angka (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu selama 60 hari pengumuman baik ada atau tidak ada sanggahan, sesuai Pasal 64 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.

h. Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat

Sesuai Pasal 67 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah yaitu diadakan pembukuan hak dengan penegasan konversi dibukukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis. Jangka waktu penerbitan sertipikat pelaksanaan kegiatan PRONA tahun 2012 adalah enam sampai delapan bulan dari awal proses kegiatan PRONA. Penyerahan sertipikat dilakukan di masing-masing balai desa. Pengambilan sertipikat dilakukan langsung oleh 50 responden setelah menyelesaikan biaya administrasi kepada pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan KMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ada 13 responden (26% dari 50 responden) yang mengkonversikan Letter C mereka melalui PRONA dengan penghasilan di atas Standar Kelayakan Minimum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 sehingga tidak sesuai dengan Diktum Kedua huruf (a) KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Ada dua responden (4% dari 50 responden) yang belum

menerima sertipikat karena belum menyelesaikan biaya administrasi konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul kepada pemerintah desa sehingga tidak sesuai dengan Diktum Ketujuh KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasioanl Agraria.

2. Pelaksanaan konversi hak milik adat (Leter C) melalui PRONA di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan karena sebanyak 50 bidang tanah telah disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul sehingga mempermudah masyarakat yang memerlukan informasi mengenai data fisik dan data yuridis ke-50 bidang tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta.